

Pembangunan nasional: Kearifan lokal sebagai sarana dan target *community building* untuk komunitas Ammatoa

National development: Local wisdom as the instrument and target of community building for the Ammatoans

Samsul Maarif, Asman Azis, & Palupi Setiani

ALB (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM. Jalan Bulaksumur, Yogyakarta. Telepon: (0274)
588688. E-mail: anchu75@yahoo.com

Abstract

This paper is to demonstrate that for community building, nationalism and nasional building the state necessarily needs to incorporate assets and social capital of the people. In this paper, I focus on ritual practice as the asset and social capital of Ammatoans, one of marginalized indigenous peoples of South Sulawesi. Data of this paper were gathered through a fieldwork conducted in May-September 2012 through which I deployed participant observation and unstructured interviews. The research focused on ritual practice and how it functions to everyday life of Ammatoans. I observed that ritual is the “heart” of Ammatoans’ everyday practice, including socio-politics, agriculture, religion, and economy. This paper, however, discusses ritual economy practice as Ammatoans’ local wisdom that has persisted and transformed throughout history. I show that the reason why the government or the state has failed in building and empowering the people, communities, especially their economic life, has been because they have ignored the “heart” of the peoples’ everyday practice: local wisdom. This paper shows that ritual economy as Ammatoans’ local wisdom on economic system has the potential for the community development. It then concludes that local wisdom must be incorporated for the planning, conceptualization, strategies, actions for community building, nationalism, and national development because it is the asset and the social capital of the people.

Key words: *ritual economy, local wisdom, social capital, community building, national development*

Abstrak

Tulisan ini untuk menunjukkan bahwa negara dalam upaya penguatan masyarakat (*community building*), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional harus menasar aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal sosial dalam makalah ini fokus pada praktik ritual sebagai kearifan lokal komunitas Ammatoa, salah satu komunitas lokal yang selama ini terpinggirkan di Sulawesi Selatan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan Mei-September 2012 dengan menggunakan metode observasi partisipatif dan wawancara tidak terstruktur. Obyek penelitian ini adalah praktik ritual dan fungsinya terhadap kehidupan sehari-hari komunitas Ammatoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual merupakan “jantung” kehidupan sehari-hari, yang meliputi kehidupan sosial, politik, agrikultur, agama, dan ekonomi orang Ammatoa. Tulisan ini secara khusus membahas praktik ritual ekonomi (kearifan lokal) Ammatoa yang telah hidup dan bertansformasi sesuai sejarahnya. Terkait dengan itu, di sini juga dipaparkan bahwa kegagalan pengembangan masyarakat oleh pemerintah selama ini terhadap komunitas lokal, khususnya Ammatoa, dikarenakan pemerintah menafikan peran penting kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Tulisan ini kemudian menunjukkan bahwa praktik ritual, lebih khusus praktik ritual ekonomi sebagai sistem ekonomi tradisional Ammatoa berpotensi untuk dikembangkan. Pada bagian akhir kemudian disimpulkan bahwa untuk efektifitas pengembangan masyarakat lokal, wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional, kearifan lokal (praktik ritual) harus dijadikan sebagai sarana dan target karena ia adalah aset dan modal sosial.

Kata kunci: ritual ekonomi, kearifan lokal, modal sosial, *community building*, pembangunan nasional

Pendahuluan

Istilah kearifan lokal dalam wacana kebangsaan semakin populer dalam satu dekade terakhir ini. Kajian tentang tema kearifan lokal semakin berkembang. Karena kemunculan dan popularitasnya dalam masa setelah runtuhnya Orde Baru, istilah kearifan lokal dapat dilihat

sebagai respon terhadap situasi baru yang muncul pada masa reformasi. Orientasi pembangunan dalam perspektif modernitas di masa Orde Baru dipertanyakan secara serius oleh banyak kalangan pada masa reformasi. Bahkan, perspektif tersebut sering diklaim sebagai penyebab kemerosotan dan luntarnya nilai-nilai kebangsaan. Sebagai respon, konsep kearifan lokal yang berdasar pada “kearifan-kearifan” yang telah tumbuh berkembang dalam komunitas-komunitas bangsa di seantero nusantara diproyeksikan sebagai tawaran efektif untuk pengembangan wawasan kebangsaan di era reformasi. Wawasan kebangsaan dan pembangunan bangsa selanjutnya harus berdasarkan pada semangat hidup yang bersumber pada nilai-nilai sosial, agama, dan budaya masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan (Murniatmo 2000, Amirrachman 2007, Baidhawi 2003, Maula 2000, Schreiter 2006, Purwadi 2005, Sholahuddin 2008).

Cita-cita pengembangan wawasan kebangsaan yang menyertakan kearifan lokal tentu saja bukan tanpa kendala. Gempuran globalisasi dan modernisasi, di mana hampir setiap *stakeholder* adalah pelakunya, telah begitu lama dan menguat, dan bagi beberapa kalangan, telah mengikis tradisi-tradisi (kearifan) lokal (Priyono 2003, Kartono 2004). Kearifan lokal bagai barang hilang, lalu dicari kemana-mana, dan tinggal serpihan-serpihannya yang bisa ditemukan. Itupun sudah tercemari atau “cacat” baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kearifan lokal seringkali disinonimkan dengan kekolotan, keprimitifan, dan keirasionalan. Para pengikutnya kemudian menjadi segan mengusungnya. Dari sisi eksternal, modernitas selalu tampil lebih kuat, meyakinkan, dan menjanjikan. Ia hadir tidak hanya membawa tawaran baru, tapi sekaligus ancaman terhadap sesuatu yang lama. Kehadirannya yang sudah begitu lama berpengaruh besar pada keberlanjutan tradisi-tradisi lokal.

Sebenarnya, tradisi lokal dan modernitas tidak harus selalu berbenturan dan saling mencela. Keduanya bisa rukuk dan berelasi secara produktif (Lewinson 2006, Whitten 2008, Alia 2010). Situasi sekarang, di mana benturan antara keduanya tak terelakkan, justru menuntut pengelolaan secara bijak sehingga bisa lebih produktif. Tradisi lokal mustahil menolak modernitas, dan modernitas akan terus bertemu dengan lokalitas (Featherstone, Lash, & Roberstone 1995). Memikirkan untuk mengadvokasi salah satu dan mencela yang lainnya sangat tidak produktif dan sia-sia, menurut seorang filsuf Amerika keturunan Afrika, Anthony K. Appiah (2006). Dengan menunjukkan observasinya pada kasus transformasi sosial budaya di Afrika, Appiah berpendapat bahwa tradisi bisa hidup di samping modernitas. Subyek budaya di Afrika menunjukkan bahwa mereka dengan damai mengadopsi modernitas tanpa harus meninggalkan tradisi. Mereka dengan kapasitasnya masing-masing dengan bijak mampu menfilterisasi baik tradisi maupun modernitas. Appiah kemudian berpendapat bahwa tradisi (atau kearifan lokal dalam konteks kita) dan modernitas tidak perlu dipertentangkan seakan-akan keduanya secara esensial selalu saling bertolak belakang. Pendapat Appiah cukup menarik untuk diaplikasikan di Indonesia, khususnya dalam proyek pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional. Yang penting kemudian dilakukan di mana kehadiran modernitas tak terelakkan lagi, terutama untuk pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional adalah meramu keduanya dengan tujuan yang lebih produktif dan kontributif: mensejahterahkan warga. Syaratnya tentu saja adalah bahwa pembangunan harus mempersepsikan masyarakat sebagai subyek dan obyek dan karenanya melibatkan mereka secara langsung dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional menjadi mutlak (Pasaribu & Simadjuntak 1982, Tjiptoherijanto & Nagib 2008, Ali 2009, Nurcholis & Herfan 2009).

Terkait dengan isu di atas, laporan ini yang didasarkan pada penelitian lapangan menunjukkan bahwa komunitas lokal Ammatoa (dengan kearifan lokalnya) yang berdomisili di Tanah Toa kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi Selatan berpotensi untuk diikutsertakan dalam proyek pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional.

Potensi tersebut akan maksimal bila strategi dan pendekatan yang digunakan adalah *community building*.

Community building yang dipahami dalam tulisan ini adalah sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan bagi komunitas lokal. Aplikasinya adalah dengan membangun komunitas pada level keluarga; para keluarga saling belajar untuk saling bergantung, bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik kolektif maupun individual. Dalam prosesnya, kerja bersama antar keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa membangun koneksi kembali (*reconnection*) dengan cita-cita (wawasan) kebangsaan (McNeely 1999).

Komunitas Ammatoa adalah salah satu kelompok minoritas yang masih mempertahankan tradisi lokalnya yang unik. Kehidupan sehari-hari mereka umumnya masih berdasarkan pada tradisi oral, yang mereka sebut *Pasang ri Kajang* (pesan-pesan di Kajang). Itu tidak berarti bahwa mereka mengisolasi diri. Mereka misalnya telah mengenal dan memeluk Islam sejak awal abad tujuh belas. Berbagai macam program pemerintah sejak awal Orde Baru telah ditawarkan dan diterima oleh mereka. Hanya saja, hingga sekarang komunitas Ammatoa masih, oleh negara dan kelompok masyarakat dominan, dianggap sebagai warga "kelas dua". Mereka harus berubah (meninggalkan oral tradisi) jika ingin menjadi warga "kelas satu" seperti umumnya warga negara yang lain. Mereka harus mengenal dan terlibat aktif dalam tradisi atau budaya modern (Tsing 1993, Yamashita 1994, Kipp 1996, Suryadinata 1998, Li 2001, Woodward 2001, Howell 2005, Davidson & Henley 2007, Woodward 2011).

Tentu saja, situasi sekarang bukanlah yang ideal buat komunitas Ammatoa dan wawasan kebangsaan kita. Idealnya, komunitas Ammatoa harus jadi bagian dari bangunan wawasan kebangsaan, dalam artian bahwa mereka, dengan keunikan budaya yang dimilikinya, setara dengan warga lain, tanpa harus berganti budaya. Di sisi lain, agar eksistensi mereka berkontribusi secara signifikan pada pengembangan wawasan kebangsaan, komunitas Ammatoa, dan kelompok komunitas lokal sepertinya, harus aktif terlibat dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak hanya sebagai "obyek" (sebagaimana selama ini, utamanya di masa Orde Baru), tapi juga sebagai "subyek" dalam pembangunan nasional.

Untuk menjadikan komunitas Ammatoa sebagai "subyek" dan "obyek" dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional, laporan ini mengemukakan bahwa praktik *community building* akan lebih efektif bila gagasan dan praktik ritual Ammatoa dijadikan sebagai titik berangkat. Argumen ini didasari pada hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa "jantung" aktivitas sehari-hari orang Ammatoa adalah ritual. Hampir seluruh -jika bukan semuanya- pemaknaan praktik keseharian orang Ammatoa seperti ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya terkait dengan ritual. Dengan kata lain, model praktik *community building* apapun yang diterapkan di komunitas Ammatoa akan gagal bila ritual mereka diabaikan. Ritual dalam praktik *community building* harus dilihat sebagai aset orang Ammatoa, sehingga pemanfaatannya baik sebagai sarana maupun sebagai target adalah penting, jika tidak mutlak (lihat McNeely 1999:746).

Laporan ini, dengan demikian, mengurai ritual, khususnya ekonomi ritual, Ammatoa sebagai wujud kearifal lokal mereka yang potensial untuk dijadikan sarana dan target pengembangan wawasan dan pembangunan nasional. Sebelum itu, laporan ini diawali dengan uraian temuan lapangan terkait sebuah model praktik *community building* oleh pemerintah yang mereka sebut dengan Musyawarah Rencana pembangunan (MUSRENBANG). MUSRENBANG yang secara teori bisa memaksimalkan pembangunan bangsa, tapi dalam praktiknya, khususnya di

komunitas Ammatoa, telah gagal. Belajar dari kegagalan itu, bagian akhir dari laporan ini mengemukakan bahwa hanya dengan praktik *community building* yang menjadikan ritual sebagai sarana dan target, pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional akan berhasil.

Metode

Tulisan ini adalah hasil penelitian lapangan yang menggunakan dana hibah dosen/mahasiswa Sekolah Pascasarjana UGM. Penelitian tersebut dilakukan pada Mei-September 2012, tapi beberapa informasi/data juga diambil hasil penelitian yang peneliti lakukan pada 2009-2010. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah observasi partisipatif. Peneliti melakukan observasi sekaligus terlibat langsung pada berbagai aktivitas keseharian, khususnya ritual, orang Ammatoa. Dengan metode tersebut peneliti dapat melihat secara langsung dan lebih detil mengenai pola kehidupan orang Ammatoa. Dalam keterlibatannya pada berbagai aktivitas, peneliti dapat menganalisis keterkaitan antar berbagai kegiatan tersebut, seperti ekonomi, pertanian, politik, ritual dan lain-lain. Selain observasi partisipatif, peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur kepada orang Ammatoa untuk memahami lebih dalam mengenai makna dan tujuan berbagai aktivitas. Pemilihan informan didasari pada observasi: siapa yang terlibat, dan juga sesuai petunjuk orang Ammatoa. Dalam beberapa kasus, peneliti menemukan bahwa ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu kegiatan (khususnya ritual) yang diobservasi, tapi tidak bersedia menjelaskan pandangannya. Mereka itu justru mengarahkan peneliti untuk menemui orang-orang tertentu yang dianggapnya lebih paham.

Penggunaan dua metode di atas, di samping teknik dan alat bantu seperti kamera (foto album) dan diskusi kelompok yang informal, peneliti dapat mengumpulkan data terkait dengan masalah penelitian. Bagian berikut merupakan hasil analisis terhadap temuan lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Politik MUSRENBANG

Sejak reformasi, sikap dan perhatian negara terhadap masyarakat lokal memang berubah. Negara pasca Orde Baru dalam beberapa kebijakannya menganggap bahwa rezim sebelumnya telah melakukan kesalahan dalam proses pembangunan bangsa. Sistem *top-down* sebagai karakter pembangunan Orde Baru justru cenderung menjadikan warga negara teralienasi dari bangsanya sendiri (Dasgupta & Beard 2007, Marshall 2007, Maybury-Lewis 1997, Suryadinata 1997). Kebijakan Orde Baru yang sangat populer seperti pembinaan masyarakat terasing adalah contoh bagaimana kelompok masyarakat lokal harus merubah diri, atau menjadi orang lain, untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan nasional (Adams 2006, Aragon 2000, Atkinson 1983, Kipp 1996, Kipp & Rodgers 1987, Koentjaraningrat 1993, Li 2001, Rachmadi 1990, Suryadinata 1998, Tsing 1993). Sistem *top-down* tersebut dianggap tidak lagi efektif oleh negara pasca reformasi. Berbarengan dengan kebijakan desentralisasi, sistem *bottom-up* kemudian diusung dan dipopulerkan oleh rezim reformasi. Sistem tersebut, paling tidak secara teori, menekankan pentingnya mengedepankan aspirasi atau kepentingan rakyat dalam pembangunan nasional. Negara telah mendeklarasikan bahwa partisipasi semua pemangku kepentingan sampai tingkat paling bawah dalam kebijakan pembangunan adalah keharusan. Partisipasi masyarakat atau seluruh pemangku kepentingan harus menjadi karakter pembangunan nasional di masa reformasi.

Ide pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekali lagi paling tidak secara teori, secara kongkrit termaktub dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana pembangunan

jangka menengah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, kordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat adalah kewajiban. Untuk implementasi kedua Undang-Undang tersebut kemudian dibentuklah suatu program yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Implementasi kebijakan MUSRENBANG di beberapa daerah telah menunjukkan hasil positif (Wibowo 2009), di samping beberapa masalah yang masih tersisah. Pada masyarakat Ammatoa, kebijakan tersebut juga sudah diimplementasikan. Sampai pada tiga tahun yang lalu, animo masyarakat terhadap ide dan praktik MUSRENBANG tampak besar. Mereka cukup bersemangat ketika diundang untuk rapat MUSRENBANG. Mereka memahami bahwa mereka berada dalam satu model relasi yang baru dengan pemerintah. Jika mereka bandingkan dengan relasi mereka dengan pemerintah (negara) sebelumnya, kehadiran MUSRENBANG menunjukkan bagi mereka bahwa pemerintah telah merangkul mereka, telah mengakui eksistensi mereka, dan telah mengakomodasi dan melindungi mereka.

Kehadiran MUSRENBANG seolah bagi orang Ammatoa adalah momen "rujuk" antara tradisi dan modernitas. Kesabaran mereka untuk bertahan dan mempertahankan tradisi walau gempuran modernitas anti-tradisi silih berganti terasa berbuah karena program MUSRENBANG. Apa yang sejak awal mereka yakini --meninggalkan tradisi justru akan menyengsarakan, semakin ditegaskan dengan adanya MUSRENBANG. Tentu keberadaan MUSRENBANG tidak dipahami sebagai kemenangan tradisi, tapi tradisi dilihatnya mendapat tempat untuk bergeliat; sebuah suasana yang sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana pada masa rezim Orba Baru mereka dianggap eksis hanya jika secara pragmatis berkontribusi pada kepentingan politik pemerintah, misalnya untuk kepentingan turisme (Erb 2007:248, Adams 1997).

Ide dari kebijakan MUSRENBANG memang cukup menjanjikan akan pelibatan atau partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan nasional. Di saat beberapa orang Ammatoa dilibatkan dalam rapat MUSRENBANG, tidak jarang ide-ide lokal (*local wisdom*) dinyatakan oleh orang Ammatoa. Dari pelaksanaannya saja, seorang informan berkomentar:

"Inilah yang Pasang ri Kajang (pesan di Kajang, tradisi oral) anjurkan. Pasang mengatakan: ... *abbulo sipappa, aklemo sibatu, tallang sipahua, manyu siparampe, lingu sipainga* ... (... bagai bambu [walau memiliki banyak ruas] tapi tetap satu, bagai sebiji jeruk [walau berulas banyak] tetap satu, jika tenggelam diangkat, jika hanyut diselamatkan, jika lupa diingatkan...). Pasang tersebut memerintahkan persatuan dan kesatuan. Rapat (MUSRENBANG) adalah upaya untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Semua tokoh dan yang lain diundang dan dilibatkan untuk membicarakan apa yang terbaik untuk semua. Karena kita dilibatkan bersama, apapun hasilnya akan membawa pada persatuan."

Ketika rapat, peserta rapat seringkali mengundang atau mempersilahkan sesepuh Ammatoa yang dianggap memiliki kebijaksanaan untuk menyampaikan pendapat terkait isu pembangunan. Dalam salah satu rapat MUSRENBANG di tahun 2009, ditanyakan misalnya apa yang harus dikembangkan di masyarakat Ammatoa. Seorang peserta rapat mengusulkan bahwa perlu pengadaan alat-alat ritual yang saat itu sudah sulit ditemukan setiap kali diadakan ritual. Sekalipun pada saat itu gagasan tersebut tidak mendapatkan tanggapan serius dan faktanya tidak masuk daftar usulan, karena menurut salah seorang peserta rapat, gagasan tersebut tidak produktif untuk pengembangan ekonomi, pengusul telah mendapat ruang untuk mengungkapkan pandangannya.

Namun ketika ditanyakan mengapa gagasan tersebut dianggap penting, sang pengusul menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi di Ammatoa tidak bisa dilepaskan dari praktik ritual. Dia lebih jauh menegaskan bahwa apapun metode pengembangan komunitas, termasuk

ekonomi, jika terpisah dari praktik ritual, apalagi jika sengaja dipisahkan, akan sulit diaplikasikan. Walaupun diaplikasikan dan berhasil, akan sulit dikembangkan atau dipertahankan. Pandangan orang Ammatoa ini menjadi landasan pemahaman pada laporan ini bahwa sistem ekonomi yang berlaku secara dominan di Ammatoa yang dipraktikkan secara tradisional telah hidup dan berkembang dalam praktik ritual. Inilah yang merupakan poin utama dalam laporan ini yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Sampai pada poin ini, dapat dikatakan bahwa melalui MUSRENBANG kearifan lokal dapat tersaring sebagai salah satu sumber gagasan untuk pembangunan nasional. Contoh di atas memang menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak ditanggapi. Tapi terdapatnya ruang untuk mengutarakan gagasan sudah merupakan poin penting. Jika kita mengingat sejarah relasi negara dengan masyarakat lokal, contoh kasus tersebut adalah sebuah kemajuan yang cukup signifikan. Sekalipun gagal jadi salah satu daftar usulan, gagasan kearifan lokal, karena punya ruang untuk diuraikan dan didiskusikan, cukup potensial untuk dijadikan sebagai konten, target, dan sekaligus landasan konsep pembangunan nasional. Kebijakan MUSRENBANG membuka peluang tersebut.

Respon Ammatoa

Perubahan kebijakan negara (dari Orde Baru ke regim Reformasi), misalnya dalam konteks Ammatoa, melalui kebijakan MUSRENBANG telah mengubah persepsi warga Ammatoa terhadap negara, sebagaimana perubahan persepsi negara terhadap mereka. Contoh sebelumnya sudah menjelaskan bahwa pada masa reformasi masyarakat lokal, khususnya Ammatoa, telah merespon secara kebijakan Negara pro-aktif. Kebijakan MUSRENBANG oleh pemerintah dengan demikian bisa dijadikan sebagai instrumen pengembangan masyarakat yang dengannya pembangunan nasional bisa dikembangkan. Kemungkinan tersebut paling tidak ditunjukkan oleh sikap dan tanggapan orang Ammatoa di awal-awal implementasi kebijakan MUSRENBANG.

Tapi bahwa gagasan yang berupa bagian dari kearifan lokal seperti contoh di atas belum mendapat tanggapan positif, kebijakan MUSRENBANG, yang sekali lagi secara teori cukup ideal, tetap punya masalah dalam hal mempertimbangan kearifan lokal sebagai sarana dan target pembangunan nasional. Memang, bila dicermati lebih jauh, masalah yang ada masih cukup kompleks. Sebagaimana contoh yang diurai sebelumnya, kegagalan mendapatkan tanggapan positif itu disebabkan karena (salah satunya) kearifan lokal belum dipahami. Mayoritas pemangku kebijakan tampaknya masih sangat menggandrungi wacana pembangunan modern, tepatnya ideologi Orde Baru. Mereka masih belum mampu atau mau memahami signifikansi sistem-sistem tradisional yang telah hidup dan berkembang di masyarakat lokal (Ammatoa), apalagi menjadikannya sebagai bagian (baik sistem maupun konten) perumusan pembangunan komunitas.

Itulah sebabnya mengapa MUSRENBANG bisa diklaim gagal. Kegagalannya karena terbatas pada pelibatan masyarakat dalam pengusulan. Padahal, dalam praktik *community building*, sekedar partisipasi masyarakat tidak cukup. Anggota komunitas harus memainkan peran utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi untuk pengembangan diri mereka sendiri (McNeely 1999:745). Angela Blackwell & Raymond Colmenar (1999) juga menjelaskan bahwa inti dari *community building* adalah terbangunnya kerja bersama dengan masyarakat setempat dalam perumusan pandangan strategis untuk pengembangan komunitas dan berkonsentrasi pada kapasitas yang dimiliki oleh komunitas untuk memecahkan bukan hanya masalah yang sedang dihadapi, tapi juga yang mungkin muncul kemudian. Mereka juga menegaskan bahwa kerjasama dimulai dengan mengembangkan sebuah pemahaman masalah dan tantangan, mendengarkan semua pihak yang terlibat dan yang berkepentingan, dan dalam perumusan solusi, kemampuan/kekuatan yang ada dalam komunitas adalah fokus utama untuk

merajut fondasi dalam setiap rencana dan program baru (1999:489). Prinsip-prinsip pembangunan komunitas inilah yang terabaikan dalam MUSRENBANG.

Lebih jauh, kegagalan kebijakan MUSRENBANG melibatkan kearifan lokal, khususnya di masyarakat Ammatoa, terletak pada bahwa MUSRENBANG telah dijadikan komoditi politik. Dalam praktiknya, setiap kali rapat MUSRENBANG setiap peserta rapat diminta untuk menyampaikan usulan mengenai apa saja yang perlu dikembangkan. Usulan dari individu-individu peserta rapat diinventaris sebanyak-banyaknya. Karena keterbatasan alokasi dana atau anggaran, usulan harus disaring untuk menemukan yang paling urgen: mana yang paling prioritas. Namun, usulan yang akan dibawa pada level yang lebih tinggi dalam struktur negara pengambil kebijakan harus yang paling diprioritaskan, sehingga yang sering terjadi, saringan usulan hanya menyisakan satu atau dua. MUSRENBANG desa (level paling bawah, di mana masyarakat Ammatoa terlibat) boleh menginventarisir ide-ide sebagai bagian dari aspirasi warga, tapi usulan yang sampai pada level kecamatan harus tinggal satu. Pada level kecamatan, usulan dari desa yang telah diprioritaskan harus bersaing dengan desa lain. Dari usulan desa-desa di kecamatan kembali digodok atau dipangkas sebelum dibawa ke kabupaten. Usulan beberapa desa sudah ada yang harus terpangkas di level ini. Ketika sampai di kabupaten, "hanya desa yang punya orang di DPRD yang akan dapat," demikian komentar salah seorang informan. Desa Tanah Toa, desa di mana warga Ammatoa berdimisili, hingga hari ini belum pernah dapat tanggapan atau usulannya diterima.

Nasib MUSRENBANG seperti dijelaskan tentu menuai respon negatif. Awalnya ia "menyejukkan" hati orang Ammatoa, saat ini (2012) menciptakan kekecewaan baru. Banyak orang Ammatoa saat ini menganggap bahwa MUSRENBANG tidak lebih dari sekedar "komoditi politik." Ia ada untuk kepentingan politik pemerintah, dan bukan untuk kepentingan rakyat. Dengan MUSRENBANG, negara menunjukkan bahwa ia telah mengikut sertakan warga negara, termasuk masyarakat lokal, dalam pembangunan nasional. Dengan MUSRENBANG, pemerintah sudah bisa berdalih bahwa mereka sudah menjalankan amanat reformasi sebagaimana termaktub dalam UU. No. 25 Tahun 2004 dan UU. No. 32 Tahun 2004. Seperti telah diurai di atas, pemerintah melalui MUSRENBANG telah memetik hasil. Pemerintah berhasil menunjukkan bahwa negara versi Reformasi telah berpihak pada rakyat. Sementara rakyat, khususnya masyarakat lokal seperti Ammatoa, tidak memperoleh apa-apa kecuali iming-iming dan khayalan-khayalan baru.

Saat ini, sikap orang Ammatoa terhadap MUSRENBANG cenderung apatis. Mereka tidak lagi bersemangat memenuhi undangan rapat. Rapat-rapat untuk menginventarisir usulan-usulan warga sudah membosankan. Beberapa informan berkomentar jika diundang rapat, "Penuhi saja dulu usulan-usulan tiga tahun lalu, penuhi satu saja dari beberapa usulan, baru adakan rapat MUSRENBANG lagi." Pihak aparat desa pun sudah merasa berat untuk mengundang warga karena ekspektasi dari MUSRENBANG tak pernah ada realisasinya.

Respon orang Ammatoa terhadap negara, sekali lagi, menjadi apatis, walau tidak seperti pada masa Orde Baru. Jika Orde Baru dilihat sebagai ancaman dan bukan pengayom akan eksistensi mereka, Orde Reformasi bukan ancaman tapi juga bukan pengayom. Dengan anggapan seperti itu, mereka kemudian memahami bahwa kalau bukan diri mereka sendiri yang berbuat, maka tidak akan ada apa-apa. Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah atau negara justru menimbulkan etos kerja yang tinggi. Etos tersebut tentu saja bukan hal baru bagi orang Ammatoa, tapi Orde Reformasi telah memberi mereka ruang untuk membangun harapan dan meningkatkan etos kerja. Reformasi, walau bukan tumpuan harapan, telah mengembangkan wacana yang menyuntik semangat orang Ammatoa untuk berbangga sebagaimana adanya mereka.

Sejarah singkat MUSRENBANG menunjukkan bahwa sistem dan metode negara dalam mengolah warganya, khususnya masyarakat lokal, sebenarnya sudah menunjukkan potensi dalam upaya pembangunan komunitas (*community building*). Namun karena potensi tersebut ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal, sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya, warga menjadi apatis, dan tampaknya kita tidak bisa berharap banyak jika model *community building* ala MUSRENBANG yang terus diterapkan.

Sebagai alternatif, *community building* yang tepat diterapkan adalah yang menitik beratkan pentingnya modal sosial dan partisipasi aktif warga sebagai sarana dan sekaligus tujuan/target pembangunan nasional (Blackwell & Colmenar 1999:490). Untuk kasus komunitas Ammatoa, modal sosial yang bisa (dan harus) dioptimalkan adalah institusi keagamaan dan kebudayaan mereka: ritual. Dengan menjadikan ritual sebagai sarana dan target pembangunan, partisipasi aktif warga Ammatoa akan maksimal. Sebagai pendekatan, *community building*, Blackwell & Colmenar menjelaskan, memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, integrasi pengembangan masyarakat lokal dan strategi pelayanan umum; pembangunan kapasitas lokal dalam pemecahan masalah dan pembentukan relasi antara komunitas dan institusi kebijakan; integrasi kepentingan masyarakat lokal dalam kesempatan yang ditawarkan oleh negara; pengelolaan secara terbuka dan kongkrit isu-isu terkait dengan kesukuan, agama, dan tradisi lokal, termasuk tantangan dan peluangnya dalam pengembangan komunitas; pengakuan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk aset mereka seperti modal sosial dan kepemilikan properti komunal; jaminan partisipasi komunitas dalam pengembangan dan implementasi kebijakan; dan adanya mekanisme akuntabilitas sehingga berbagai kerja sesuai dengan standar komunitas atau rancangan program-program dapat dikaitkan langsung dengan kondisi lokal (Blackwell & Colmenar 1999:490).

Prinsip *community building* inilah yang lebih efektif untuk mengikutsertakan kearifan lokal dalam pengembangan wawasan dan pembangunan nasional. Kearifan tradisi lokal yang mencakup nilai-nilai budaya dan agama dan sistem politik dan ekonomi harus jadi bagian penting dalam pengembangan wawasan dan pembangunan nasional. Mestinya, pemerintah dalam perumusan dan pengambilan kebijakan serta implementasi kebijakannya menerapkan prinsip ini karena kebijakan negara pada prinsipnya adalah proses *community building* (Blackwell & Colmenar 1999: 494).

Lebih jauh, rumusan *community building* menghendaki bahwa falsafah kebijakan harus mengedepankan "kebaikan umum" (*common good*), dan membangun "kehendak publik" (*public will*) yang kuat untuk kesetaraan (*equity*) dan penyertaan (*inclusion* atau *involvement*). Konsep kebaikan umum harus didasarkan pada diskusi cita-cita pembangunan nasional dan kearifan lokal. Komunitas Ammatoa harus dilihat sebagai bagian bangsa yang setara dengan komunitas lain yang memiliki potensi dalam memberi kontribusi terhadap konsep kebangsaan. Keunikan mereka (yang sering diklaim kolot) harus diikutsertakan dalam wawasan kebangsaan. Dalam mengikutsertakan komunitas Ammatoa juga harus meningkatkan tingkat keterlibatan dan partisipasi politik dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang proses dan substansi kebijakan. Ini perlu dilakukan agar mereka paham bahwa partisipasi mereka begitu signifikan (Blackwell & Colmenar 1999: 496).

Uraian berikut adalah kearifan lokal orang Ammatoa. Laporan ini, berdasarkan prinsip *community building* sebagaimana ditegaskan di atas, menegaskan bahwa hanya dengan menjadikan kearifan lokal Ammatoa sebagai sarana dan target/tujuan, negara dalam proyek pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasionalnya akan lebih optimal mensejahterahkan rakyatnya.

Ekonomi ritual: Kearifan lokal orang Ammatoa

Gerak kehidupan sosial budaya orang Ammatoa sangat terkait dengan ritual. Pada penelitian sebelumnya (Maarif 2012a), peneliti mengidentifikasi bahwa orang Ammatoa memiliki lebih dari tiga puluh macam praktik ritual. Banyaknya praktik ritual orang Ammatoa menunjukkan bahwa hampir -jika tidak semua- praktik kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari praktik ritual. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa berbagai macam ragam praktik kehidupan sehari-hari orang Ammatoa dinilai berdasarkan makna ritual. Lebih tepatnya, praktik ekonomi, politik, pertanian, nelayan, perjamuan, dan berbagai praktik budaya lainnya merupakan dimensi agama atau ritual.

Laporan ini pun menegaskan bahwa pemahaman terhadap praktik ritual menjadi niscaya bila ingin memahami praktik kehidupan sehari-hari orang Ammatoa. Praktik ritual yang darinya baik orang Ammatoa maupun peneliti adalah apa yang disebut kearifan lokal orang Ammatoa. Itulah yang melandasi pandangan dunia dan prilaku orang Ammatoa.

Perlu ditegaskan bahwa pada laporan ini kearifan lokal dipahami sebagai bentuk praktik budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai masa lalu yang bertransformasi untuk konteks kekinian melalui tradisi. Kearifan lokal merupakan nilai dan praktik masa sekarang yang merujuk pada nilai-nilai tradisi (masa lalu). Nilai tradisi yang dimaksud tentu tidak dipahami sebagai sesuatu yang murni tanpa "kontaminasi." Ia bertransformasi terus-menerus secara kontekstual. Nilai-nilai tersebut selalu dipertahankan sekaligus terus dipertanyakan. Demikianlah sehingga pemaknaan dan prilaku terkait dengan nilai-nilai tradisi (kearifan lokal) selalu tidak tunggal, tapi beragam. Namun dalam variasinya terdapat pemahaman umum yang diperpegangi oleh anggota komunitas. Itulah yang disebut nilai-nilai kolektif (*shared values*).

Kegagalan *community building* ala MUSRENBANG karena ia mengabaikan praktik ritual. Keengganan pemerintah (negara) untuk menjadikan kearifan lokal orang Ammatoa sebagai landasan pengembangan wawasan dan pembangunan nasional, sebagaimana digambarkan di atas, semata karena pemerintah tidak (mau) memahaminya. Kearifan lokal masih dianggap kolot dan dipersepsikan sebagai akibat ketertinggalan. Bagi mereka, praktik ekonomi, politik, agrikultur, dan seterusnya, tidak terkait dengan ritual. Mereka berpandangan bahwa untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, orang Ammatoa perlu meninggalkan ritual. Praktik ritual Ammatoa, khususnya dengan perjamuan besar yang tentu saja menggunakan dana besar, bahkan seringkali dilihatnya sebagai prilaku pemborosan atau bertentangan dengan prinsip ekonomi modern.

Persepsi seperti di atas jelas merupakan kesalahpahaman. Ia salah memahami dan menafsirkan ritual ekonomi orang Ammatoa. Untuk menunjukkan kesalahpahaman tersebut, berikut adalah uraian tentang ekonomi ritual orang.

Dari puluhan ritual orang Ammatoa, ada lima macam ritual yang bisa dilihat sebagai praktik ekonomi ritual orang Ammatoa. Tentu saja kelima ritual tersebut tidak akan diurai satu persatu. Untuk uraian lengkap mengenai hal ini bisa dilihat pada Samsul Maarif (2012a, 2012b).

Kelima macam ritual tersebut (*kalomba* atau inisiasi, *akkatterek* atau potong rambut, *pabbuntingan* atau pernikahan, *tampung* atau kematian, dan *minro bajik* atau restorasi status) selalu melibatkan pemotongan hewan: kerbau, sapi, atau kuda, di samping puluhan atau ratusan ayam sebagai bahan perjamuan ratusan orang. Dana yang ditanggung oleh yang mensponsori ritual tentu banyak, sehingga persiapan untuk mensponsori ritual tentu harus matang secara finansial. Kelima ritual ini, dan juga ritual-ritual lainnya, adalah bagian kebudayaan orang Ammatoa sehingga mensponsorinya adalah "wajib." Akan menjadi "cela" bagi seseorang bila enggan melakukannya. Pada sisi ini, seseorang boleh menilai bahwa orang Ammatoa terhimpit

oleh kewajiban tradisi sehingga tradisilah yang menjadi tujuan utama dan "kemajuan" ekonomi kemudian tidak dihiraukan dalam praktik ritual.

Uang sebagai alat perekonomian yang juga sudah menjadi bagian dari praktik ekonomi orang Ammatoa ternyata bukan hanya dibutuhkan oleh sponsor ritual. Beras yang dimasak untuk menjamu para undangan juga bukan hanya dibutuhkan oleh sponsor ritual. Uang dan beras dalam praktik ritual dibutuhkan baik oleh sponsor ritual maupun oleh yang lain (para undangan). Jika sponsor ritual "wajib" membelanjakan uang dan memasak beras untuk perjamuan, maka para undangan "wajib" memberi uang (*solok*) dan membawa beras (*erang berasa*) ke sponsor ritual. Semakin banyak seorang sponsor ritual menjamu atau menyediakan perjamuan, semakin banyak pula ia menerima uang dan beras. Bagi orang Ammatoa, mensponsori ritual adalah "panen." Setelah mensponsori ritual, seseorang akan memiliki modal besar. Dengan modal tersebut, seseorang dapat (jika mau) menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi dan/atau membeli barang-barang mahal, seperti sepeda motor, mobil, dan juga membangun rumah jika mau.

Dalam praktiknya, jika seseorang mensponsori ritual, maka anggota komunitas berduyun-duyun membawa beras kepada sponsor ritual. Yang membawa beras atau disebut dalam istilah lokalnya *erang berasa* adalah kaum perempuan. Para perempuan secara berkelompok mulai membawa beras kepada sponsor sejak disampaikan pemberitahuan bahwa ritual akan dilaksanakan hingga puncak ritual dilakukan. Biasanya, pelaksanaan ritual, termasuk persiapannya, semacam ini memakan waktu mingguan, dan karenanya para perempuan Ammatoa dapat dilihat membawa beras di atas kepalanya selama itu. Jika ritual semacam itu disponsori lima sampai tujuh kali sebulan oleh keluarga yang berbeda, yang kasusnya memang demikian, maka *erang berasa* merupakan pandangan sehari-hari.

Sejak awal perencanaan ritual, sponsor ritual sudah menyediakan karung-karung besar untuk menampung beras bawaan orang lain. Karung-karung tersebut sengaja ditempatkan di tengah rumah sebagai cara untuk menunjukkan kepada orang lain seberapa banyak (atau sedikit) sang sponsor terima. Bagi orang Ammatoa, penerimaan beras mengindikasikan kondisi sang sponsor. Seorang sponsor ritual yang menerima beras yang banyak menunjukkan bahwa ia seorang terhormat. Dia disenangi banyak orang karena tentu saja dia baik sama orang lain. Orang lain ikut bersedih mengenai nasib seorang sponsor jika karung-karung yang disediakan sang sponsor kecil-kecil dan tidak penuh. Kasus semacam itu, bagi orang Ammatoa, menunjukkan bahwa sang sponsor adalah seorang yang miskin, malas, dan tidak baik.

Demikian juga dengan pemberian uang (*solok*). Berbeda dengan *erang berasa*, pemberian uang dilakukan oleh laki-laki. Jika *erang berasa* dilakukan sejak awal persiapan ritual, maka pemberian uang dilaksanakan pada puncak pelaksanaan ritual yang selalu berlangsung pada malam hari. Sebagaimana kasus *erang berasa*, *solok* pun dicatatkan oleh sang sponsor mengenai siapa yang membawa berapa. Setelah ritual selesai, jumlah uang yang didapatkan oleh sang sponsor ritual dari para undangan diumumkan. Isi pengumumannya adalah nama orang yang membawa jumlah uang. Berdasarkan observasi di lapangan, jumlah uang diberikan beragam dari Rp. 200.000,00. hingga Rp. 2.000.000,00. Menurut cerita informan, ada di antara mereka bahkan memberi atau menerima uang Rp. 5.000.000,00. Setelah disebut satu persatu pemberi uang beserta jumlah uang yang diberikan, total jumlahnya juga disebutkan. Sebagaimana beras yang diterima, jumlah uang yang diterima, bagi orang Ammatoa, menunjukkan status sang sponsor. Jika jumlah uang yang diterima banyak, sang sponsor dianggap sebagai orang mulia yang patut diteladani. Jika sedikit, maka dia jadi bahan gosipan orang lain yang dikasihani.

Demikianlah proses *erang berasa* dan *solok* yang selalu jadi bagian ritual dengan perjamuan besar. Tampak sudah mengapa pelaksanaan ritual merupakan "panen" bagi sang sponsor. Ia

menerima beras yang berkarung-karung dan uang dengan jumlah jutaan. Mereka memang menghabiskan banyak dana untuk mensponsori ritual, tapi dengan itu mereka justru memperoleh uang lebih banyak.

Lebih lanjut, *erang berasa* dan *solok* bukanlah pemberian cuma-cuma. Seperti sudah dikatakan sebelumnya, pemberian beras dan uang dicatat oleh sang sponsor. Sang sponsor harus mencatatnya secara rapi karena ketika salah satu yang memberi beras dan uang juga mensponsori ritual, maka yang menerima tadi harus (bagaimana pun caranya) memberi juga (mengembalikan beras dan uang) dengan jumlah minimal sama. Adalah aib besar bila yang menerima tidak mampu mengembalikan dengan jumlah minimal sama, dan kebanggaan bila dapat mengembalikan lebih dari yang pernah diterima.

Erang berasa dan *solok*, dengan demikian, adalah "tabungan" bagi para tamu pelaksana ritual. Di samping sebagai momen "panen" bagi sponsor ritual, momen ritual juga, sekali lagi, sebagai momen "tabungan" bagi para tamu. Orang Ammatoa berlomba memberi beras dan uang yang banyak kepada sang sponsor karena di samping nama mereka akan disebutkan pada pengumuman hasil pemberian *solok* --sungguh suatu kebanggaan luar biasa jika nama mereka disebut penyumbang terbanyak--, mereka juga akan menerima kembali (panen) berapapun yang mereka berikan ketika giliran mereka yang mensponsori ritual.

Praktik ritual, sebagai jantung budaya orang Ammatoa, inilah yang merupakan sumber etos kerja orang Ammatoa. Mereka harus bekerja keras agar dapat uang di samping untuk kehidupan sehari-hari mereka juga untuk *solok* atau menabung. Mereka yang sudah mensponsori ritual dan menerima sumbangan beras dan uang banyak harus mampu memenej pemberian tersebut di samping agar kehidupan ekonomi mereka semakin meningkat juga agar mereka punya beras dan uang ketika giliran mereka yang harus menyumbang. Untuk tujuan "tabungan" dan "panen," orang-orang Ammatoa rata-rata memiliki lebih dari satu profesi, tapi umumnya mereka petani. Walaupun misalnya mereka sedang mengolah sawah atau kebun mereka sendiri, jika ada lowongan kerja lain, utamanya yang temporer untuk gaji tunai, mereka umumnya menangkap peluang tersebut tanpa meninggalkan sawah dan kebun mereka. Ada beberapa PNS sebagai guru atau pegawai negeri lain juga sebagai petani. Fakta bahwa orang Ammatoa umumnya memiliki lebih dari satu pekerjaan adalah indikasi etos kerja mereka yang relatif tinggi.

Ekonomi ritual inilah yang bisa dirujuk sebagai kearifan lokal Ammatoa dalam hal ekonomi. Praktik ekonomi bagi orang Ammatoa bukanlah semata aktifitas "keduniaan" sebagaimana orang sekular modern memahaminya. Ia, karena karakternya yang ritualistik, adalah aktifitas keagamaan (Maarif 2012a, 2012b). Sebagai praktik keagamaan, aktifitas ekonomi orang Ammatoa bertujuan bukanlah untuk kesejahteraan diri (mengumpulkan kekayaan, untuk kepentingan diri sendiri) sebagaimana tujuan ekonomi kapitalis, tapi untuk "berbagi" dengan sesama (Maarif 2012b). Manusia ideal bagi orang Ammatoa adalah seseorang yang berhasil dalam usahanya lalu dengan hasil usahanya itu ia berbagi dengan sesama, yang dalam praktiknya dilakukan melalui ritual.

Kearifan lokal orang Ammatoa, khususnya ekonomi ritual mereka yang dengannya etos kerja dipupuk dan ditempa, tentu layak dilihat sebagai potensi besar untuk proyek pengembangan wawasan kebangsaan. Nilai luhur yang terkandung pada ritual ekonomi Ammatoa berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Wajar kemudian jika sistem ekonomi Ammatoa menghendaki keterlibatan setiap anggota komunitas. Setiap orang pada waktunya "wajib" mensponsori ritual. Ekonomi ritual Ammatoa adalah aktifitas dari, oleh, dan untuk Ammatoa. Inilah salah satu konten wawasan kebangsaan yang layak dipromosikan. Inilah salah satu kekayaan nilai budaya nusantara yang perlu terus digali dan dikembangkan, terutama di era maraknya kecenderungan untuk memperkaya diri dan keluarga sendiri (atau suburnya budaya korupsi).

Community building harus diarahkan pada ekonomi ritual Ammatoa bila ekonomi mereka akan dikembangkan. Inisiasi-inisiasi proyek pengembangan harus berfokus pada penguatan nilai-nilai kearifan lokal seperti telah digambarkan. Penguatan nilai-nilai tersebut sebagai landasan pengembangan akan memudahkan penciptaan modal sosial dan kemanusiaan karena seperti juga telah dijelaskan, ekonomi ritual "mewajibkan" setiap anggota untuk berpartisipasi aktif. Sistem ekonomi ritual tersebut merupakan sistem jaringan yang mengikat individu-individu komunitas. Bagi ilmuwan sosial, *ties that bind* adalah modal sosial (McNeely 1999:745).

Selain itu, ekonomi ritual Ammatoa juga pantas dilihat sebagai sarana pembangunan nasional, khususnya untuk proyek pengembangan ekonomi masyarakat lokal Ammatoa. Usulan salah seorang Ammatoa ketika rapat MUSRENBANG untuk pengadaan perlengkapan alat-alat ritual sebagai strategi pengembangan ekonomi Ammatoa sekarang sudah logis. Praktik ritual orang Ammatoa bisa dilihat fungsinya sebagaimana fungsi perbankan dalam sistem ekonomi modern. Perputaran uang dalam praktik ritual begitu intensif dan efektif dalam meningkatkan "kesejahteraan" ekonomi Ammatoa.

Ekonomi ritual juga bisa dilihat sebagai institusi keagamaan dan kebudayaan. Ia adalah salah satu aset penting bagi keagamaan dan kebudayaan Ammatoa. Joseph McNeely menegaskan bahwa *community building* yang didasarkan pada perspektif "pemecahan masalah" atau "pemuahan kebutuhan" tidaklah menjanjikan. Alternatifnya adalah pengembangan aset. Artinya, *community building* itu juga harus mengidentifikasi aset-aset komunitas dan mengembangkan rencana-rencana yang bisa membangun aset-aset tersebut (McNeely 1999:746). Aset dan modal sosial Ammatoa paling dominan, sekali lagi, adalah ritual mereka dan itulah yang perlu dikembangkan.

Perlu ditambahkan bahwa di samping sistem ekonomi tradisional (resiprokal), sistem ekonomi modern (kapitalis) juga sudah dipraktikkan oleh orang Ammatoa. Di Desa Tanah Toa, di mana kebanyakan orang Ammatoa berdomisili, sudah beroperasi sebuah pasar, betapapun sederhananya. Sistem pasar, sebagai komponen fundamental sistem ekonomi kapitalis modern (Carnegie 2008:364), dengan demikian juga sudah merasuki sistem perekonomian orang Ammatoa. Di samping aktifitas ekonomi dengan cara barter (resiprokal) yang masih kental, penggunaan uang sebagai alat pertukaran barang dan jasa juga sudah menjadi bagian aktifitas ekonomi orang Ammatoa. Kehadiran pasar merupakan arena pengenalan dan pengembangan sistem ekonomi modern dalam kehidupan orang Ammatoa.

Poin yang ingin ditunjukkan di sini adalah orang Ammatoa, sekalipun masih setia dengan sistem ekonomi tradisionalnya, juga tetap terbuka dengan sistem ekonomi baru (kapitalis modern). Keterbukaan itu menunjukkan bahwa mereka tidak melihat dua sistem yang berbeda itu bertentangan (*mutually exclusive*). Orang lain mungkin mempertentangkannya, tapi mereka dengan strategi lokalnya telah mengolahnya secara damai dan produktif. Misalnya, untuk aktifitas ekonomi yang mereka lakukan di pasar, mereka menggunakan sistem pasar. Pertukaran barang dan jasa dilakukan dengan alat tukar uang atau aturan pasar. Mereka memahami bahwa dengan modal besar, usaha mereka berpotensi untuk berkembang dan berhasil. Mereka kemudian berusaha untuk semakin memperbesar modal: mengumpulkan uang. Namun, mereka juga memahami paling tidak mereka idealkan bahwa sebagian dari uang yang mereka kumpulkan itu adalah untuk berbagi dengan orang lain. Secara cerdas seorang informan menjelaskan bahwa, "Modal yang anda punya adalah untuk menghasilkan laba yang anda akan gunakan untuk *solok*."

Bila orang Ammatoa terbuka untuk sistem baru, maka peluang untuk menjadikan mereka sebagai partner untuk pembangunan nasional mestinya besar. Menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan nasional akan lebih produktif, atau bahkan syarat mutlak untuk

keefektifan. Tanpa pelibatan mereka sebagai subyek, pembangunan nasional akan selalu gagal, apapun strateginya, sebagaimana telah dicontohkan di atas.

Simpulan

Melanjutkan apa yang sudah dijelaskan, tulisan ini menegaskan bahwa kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat lokal harus dijadikan sebagai sumber utama pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangun nasional, jika tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterahkan rakyat. Memproyeksikan kearifan lokal sebagai nilai kekolotan sangat tidak produktif. Ia justru memiliki nilai-nilai luhur untuk diaplikasikan pada konteks ke-sini-an dan ke-kini-an oleh subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional dengan pendekatan *community building* harus mengawali pada pengembangan dan artikulasi nilai-nilai kearifan lokal, karena nilai-nilai itulah yang hidup dan berkembang di komunitas lokal (Rubin & Rubin 1992). Pengamat dan praktisi *community building* mengakui bahwa nilai kolektif (*shared values*), seperti ekonomi ritual, sangat penting dalam regenerasi komunitas. Komunitas bahkan akan hilang bila tanpa nilai kolektif yang bisa diperpegangi (Gardner 1994:5). Gardner (1994: 15-27) mengurai sepuluh ramuan *community building*, dan satu diantaranya adalah harus berlandaskan pada nilai kolektif.

Para sosiolog juga mencatat bahwa manusia itu membentuk dan memahami identitas diri dan kelompoknya paling tidak sebagiannya dari budaya mereka dan interaksi mereka dengan yang lain dalam komunitas mereka (Berger & Neuhaus 1991, Nisbett 1980). Komunitas, dengan demikian, dapat menawarkan dan memberikan rangsangan bagi terciptanya identitas individu dan rasa memiliki (Weil 1996:486). Argumen sosiolog seperti ini semakin menegaskan bahwa ritual, sebagai jantung kebudayaan dan keagamaan Ammatoa, adalah sarana mutlak untuk pengembangan komunitas. Menurut Gardner (1994), rasa memiliki tidak akan dapat bertahan tanpa adanya rasa keberlanjutan dan nilai kolektif (*shared values*). Oleh karena itu, penting untuk dipertimbangkan bagaimana satuan keluarga dan komunitas dapat didukung dan diperbaharui dalam generasi tertentu dan dalam mempertahankan sistem nilai mereka (Weil 1996: 487).

Kearifan lokal, sebagai kesimpulan, tidak hanya berpotensi tapi bahkan menjadi syarat utama untuk efektifitas dan produktifitas pembangunan nasional. Dengan mengikuti cara pikir orang Ammatoa dalam mengembangkan komunitasnya, khususnya dalam hal ekonomi, laporan ini kembali menegaskan bahwa rumusan pengembangan ekonomi harus dengan penguatan ritual Ammatoa, yang meliputi pengadaan alat-alat dan penghargaan nilai-nilai ritual Ammatoa.

Daftar Pustaka

- Adams KM (1997) Ethnic tourism and the renegotiation of tradition in tana toraja (Sulawesi, Indonesia). *Ethnology* 36(4):309–320.
- Adams KM (2006) *Art as Politics: Re-crafting Identities, Tourism, and Power in Tana Toraja, Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Ali M (2009) *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Penerbit Intima.
- Alia V (2010) *The New Media Nation: Indigenous Peoples and Global Communication*. UK: Berghahn Book.
- Amirrachman A (ed) (2007) *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP.
- Appiah KA (2006) The case for contamination. *The New York Times*. [Diakses 16 September 2010]. <http://www.nytimes.com>.
- Aragon L (2000) *Fields of the Lord: Animism, Christian Minorities, and State Development in Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Atkinson J (1983) Religions in dialogue: the construction of an Indonesian minority religion. *American Ethnologist* 10(4):684-696.
- Baidhawi Z (ed) (2003) *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Berger PL & Neuhaus J (1991) *The Structure of Freedom: Correlation, Causes, and Caution*. Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans.
- Blackwell A & Colmenar R (1999) Transforming policy through local wisdom. *Futures* 3(5):487-497.
- Carnegie M (2008) Development prospects in eastern Indonesia: Learning from Oelua's diverse economy. *Asia Pacific Viewpoint* 49(3):354-469.
- Dasgupta A & Beard VA (2007) Community driven development, collective action and elite capture in Indonesia. *Development and Change* 38(2):229-249
- Davidson JS & Henley D (ed) (2007) *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London, New York: Routledge.
- Erb M (2007) Adat Revivalism in Western Flores: Culture, Religion, and Land. Dalam: JS Davidson & D Hanley (ed). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London dan New York: Routledge. 247-274.
- Featherstone M, Lash S, & Roberstone R (ed) (1995) *Global Modernities*. London: Sage Publication.
- Gardner JW (1994) *Building Community for Leadership Studies Program*. Washington, DC: Independent Sector.
- Howell JD (2005) Muslims, the new age and marginal religions in Indonesia: changing meanings of religious pluralism. *Social Compass* 52(4):473-493.
- Kartono DT (2004) *Orang Boyan Bawean: Perubahan Lokal dalam Transformasi Global*. Purwakarta: Pustaka Cakara Purwakarta.
- Kipp RS (1996) *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian Society*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Kipp RS & Rodgers S (ed) (1987) *Indonesian Religions in Transition*. Tucson: University of Arizona Press.
- Kipp RS (1995) Conversion by affiliation: The history of the Karo Batak Protestant Church. *American Ethnologist* 22(4):868-882.
- Koentjaraningrat (1993) Membangun Masyarakat Terasing. Dalam: Koentjaraningrat (ed). *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia and Departemen Sosial. 344-350.
- Lewinson AS (2006) Domestic realms, social bonds, and class: Ideologies and indigenizing modernity in Dar es Salaam, Tanzania. *Canadian Journal of African Studies* 40(3):462-495.
- Li TM (2001) Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone. *Modern Asian Studies* 35(3):645-676.
- Maarif S (2012a) *Dimensions of Religious Practice: The Ammatoans of Sulawesi, Indonesia*. Dissertation, Arizona State University, Tempe.
- Maarif S (2012b) *Sharing: A Religious End of Economic Practice among Ammatoans*. The Winner of the Essay competition by Globalethics, Indonesia: ICRS-UGM Yogyakarta, May 2012.
- Marshall AJ (2007) The ecology of Papua. *The Ecology of Indonesia Series* 6(2):121-132.
- Maula MJ (2000) *Ngesuhi Deso Sak Kukuban: Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Maybury-Lewis D (1997) *Indigenous Peoples, Ethnic Groups, and the State (Cultural Survival Series in Ethnicity and Change)*. Boston: Allyn and Bacon.
- McNeely J (1999) Community Building. *Journal of Community Psychology* 27(6):741-50.
- Murniatmo G (2000) *Khazanah Budaya Lokal: Sebuah Pengantar untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara*. Jakarta: Adicita.
- Nisbett RE (1980) *Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgment*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Nurcholis H & Herfan D (2009) *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Pasaribu IL & Simadjuntak B (1982) *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Purwadi (2005) *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmadi S (1990) *Pembinaan Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Rubin HJ & Rubin IS (1992) *Community Organizing and Development*, edisi II. New York: Mcmillan.
- Schreiter RJ (2006) *Rancang Bangun Teologi Lokal*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sholahuddin M (2008) *Mengenal Kearifan Lokal di Klepu-Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryadinata L (1997) *Democratization and Political Succession in Suharto's Indonesia*. *Asian Survey* 37(3):269-280.
- Suryadinata L (1998) *State and Minority Religion in Contemporary Indonesia: Recent Government Policy Towards Confucianism, Tridharma and Buddhism*. Dalam: T Ayabe (ed). *Nation-State, Identity and Religion in Southeast Asia*. Singapore: Singapore Society of Asian Studies. 5–23
- Tjiptoherijanto P & Nagib L (2008) *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Di antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: LIPI Press.
- Tsing AL (1993) *In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an out-of the Way Place*. New Jersey: Princeton University Press.
- Weil MO (1996) *Community Building: Building Community Practice*. *Social Work* 141(5):481-499.
- Whitten Jr NE (2008) *Interculturality and the indigenization of modernity: a view from Amazonian Ecuador*. *Tipiti: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America* 6(1):3-36.
- Wibowo AH (2009) *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Woodward MR (2001) *Indonesia, Islam, and the prospect for democracy*. *SAIS Review* 21(2):29-37.
- Woodward MR (2011) *Java, Indonesia and Islam*. New York: Springer.
- Yamashita S (1994) *Manipulating ethnic tradition: the funeral ceremony, tourism, and television among the Toraja of Sulawesi*. *INDONESIA* 58(4):69-82